

Agensi Perempuan Menghadapi Ketimpangan Gender di Berbagai Tingkat: Tiga Narasi Kalyanamitra

Women's Agencies Addressing Gender Inequality at Various Levels: Three Narratives of Kalyanamitra

Ratna Saptari¹, Myra Diarsi², & Ruth Indiah Rahayu³

¹Universiteit Leiden, Leiden, Netherlands

²Komunitas Feminis GAIA, Indonesia

³INKRISPENA, Jakarta Selatan, Indonesia

rsaptari2009@mail.com

Kronologi Naskah: diterima 25 Juni 2025, direvisi 16 Juli 2025, diputuskan diterima 21 September 2025

Abstract

This article consists of narratives of three members of Kalyanamitra in their strategies against sexual and class inequalities in the context of the New Order regime. These personal narratives illustrate individual strategies and subjectivities in the effort to combat the state's patriarchal hegemony, organizationally. Ratna Saptari's narrative shows her involvement with women workers groups, which became the background for the formation of Kalyanamitra; Myra Diarsi's narrative illustrates the development of critical gender thinking within the existing power structures through gender training; while Ruth Indiah Rahayu's story provides an overview of Kalyanamitra's struggles in the Pro-Democracy social movement, through gender training and other social activities. These three narratives depict the interconnection between individual agency within a feminist organization and the existing authoritarian political context based on different social spaces and temporalities.

Keywords: subjectivity, patriarchal hegemony, sexual inequality.

Abstrak

Tulisan ini merupakan narasi tiga anggota Kalyanamitra dalam strategi mereka melawan ketimpangan seksual dan kelas dalam konteks rezim Orde Baru. Narasi-narasi pribadi ini menunjukkan strategi dan subjektivitas individu dalam upaya melawan hegemoni patriarkal Negara, secara organisatoris. Narasi Ratna Saptari menunjukkan trayek keterlibatan dengan kelompok buruh perempuan yang kemudian menjadi latar belakang terbentuknya Kalyanamitra; narasi Myra Diarsi menunjukkan proses pengembangan pemikiran kritis gender dalam struktur kekuasaan yang ada melalui pelatihan gender; sedangkan cerita Ruth Indiah Rahayu memberi gambaran tentang perjuangan Kalyanamitra dalam gerakan sosial Pro-Demokrasi. Ketiga narasi ini memberi gambaran keterkaitan antara agensi individu dalam sebuah organisasi feminis dengan konteks politik struktural yang ada berdasarkan ruang sosial dan waktu yang berbeda.

Kata kunci: subjektivitas, hegemoni patriarkal, ketimpangan seksual.

Pendahuluan

Tulisan ini menempatkan pengalaman tiga feminis Kalyanamitra, dalam upaya membangun agensi perempuan melawan ideologi patriarki negara di bawah rezim Orde Baru. Melalui narasi yang berakar pada pengalaman personal dalam sebuah organisasi feminis, terutama dalam konteks historis tertentu (antara 1980—1990-an), tulisan ini menyingkap berbagai bentuk kekerasan struktural yang dihadapi perempuan, baik di ruang kerja, rumah tangga, lembaga pendidikan, hingga arena politik lokal maupun nasional.¹ Ketiga narasi ini tidak hanya mendokumentasikan sejarah personal masing-masing individu, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kesadaran feminis terbentuk melalui keterlibatan langsung dengan kelompok-kelompok

yang menghadapi berbagai bentuk ketimpangan struktural yang berbasis gender.

Setiap kisah menunjukkan trayek yang berbeda dalam perjuangan dan strategi yang digunakan untuk menentang hegemoni gender pada zaman Orde Baru. Ratna Saptari menggambarkan dinamika gerakan buruh perempuan dan bagaimana Kalyanamitra lahir dari kegelisahan atas ketimpangan dan kekerasan yang dialami buruh perempuan. Myra Diarsi menunjukkan bagaimana ia mengembangkan pelatihan gender sebagai bentuk intervensi kultural dan politik terhadap ideologi kodrat yang mengakar, sementara Ruth Indiah Rahayu merefleksikan keterlibatannya dalam gerakan pro-demokrasi dan pendampingan korban

kekerasan negara serta bagaimana gerakan perempuan menghadapi situasi darurat politik pasca-1998. Walaupun tema spesifik dan ruang gerak masing-masing berbeda, namun persamaannya adalah bahwa ketiganya menunjukkan agensi atau strategi individu (dalam sebuah organisasi) menghadapi berbagai ketimpangan struktural yang ada terutama yang berbasis gender.

Metode Penelitian

Dalam tulisan ini, kami menggunakan pendekatan autoetnografi feminis, yaitu pengalaman pribadi penulis lebih dari sekedar cerita individu dan lebih menggarisbawahi narasi yang terlibat secara politik. Metodologi ini dirasa tepat untuk memahami dan menantang ketidakadilan sistemik yang dihadapi perempuan di bawah rezim Orde Baru Indonesia. Autoetnografi feminis memungkinkan penulis untuk merefleksikan pengalaman sebagai aktivis hak-hak perempuan sambil secara kritis memeriksa perannya dalam mengekspos dan mengatasi ketidakadilan berbasis gender, terutama yang menyangkut hak reproduksi dan kontrol negara atas tubuh Perempuan. Kami menggunakan model Griffin (2012) dan Arisaka (2024) dalam menceritakan pengalaman kami.

Politik Negara dalam Pengendalian Masyarakat Sipil dan Buruh Perempuan di Masa Orde Baru (Narasi oleh Ratna Saptari)

Keterlibatan dengan Diskusi-diskusi Politik

Sebagaimana telah banyak dibahas oleh para peneliti feminis dan sejarawan Indonesia, masa Orde Baru (yang nampaknya muncul lagi di masa kini) merupakan masa terjadinya upaya pembungkaman pemikiran reflektif tentang ketimpangan sosial yang ada maupun suara kritis tentang situasi perempuan di Indonesia. Represi dan stigmatisasi terhadap gerakan sosial buruh dan perjuangan perempuan di era Orde Baru amat kuat dilaksanakan di berbagai tingkatan pemerintah. Terutama setelah peristiwa Malari 1974, pendudukan kampus ITB oleh tentara pada 1978, peran rezim Orde Baru dalam pembungkaman gerakan sosial yang semakin ketat. Kebijakan NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) dan BKK (Badan Koordinasi Kemahasiswaan) yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf pada tahun 1978, mengekang kegiatan dunia kampus. Kegiatan-kegiatan yang cenderung bersifat politis, yang dianggap akan melanggar ketenteraman dan ketertiban sosial

dilarang atau diawasi secara langsung maupun tidak langsung. Terutama untuk Jurusan saya saat itu, bahan kuliah maupun literatur yang harus dibaca serta diskusi di kelas amat dibatasi secara institusional. Walaupun proses depolitisasi kampus terus berjalan, namun ini tidak berarti tenggelamnya pemikiran kritis kelompok-kelompok mahasiswa saat itu. Diterapkannya NKK/BKK oleh pemerintah menyulut pula berbagai protes di kalangan mahasiswa di berbagai kota dan muncul kelompok-kelompok diskusi di antara kelompok aktivis atau pegiat sosial yang terlibat dengan masalah-masalah sosial di luar kampus.

Pertemuan-pertemuan untuk membicarakan situasi sosial maupun politik merupakan hal yang terus dilakukan oleh kelompok-kelompok aktivis mahasiswa maupun lembaga masyarakat, yang prihatin dan khawatir dengan perkembangan politik saat itu. Saat saya menjadi mahasiswa di Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia sejak tahun 1974 sampai tahun 1980, berbagai kejadian dan tragedi politik tersebut menjadi bahan diskusi berbagai kelompok mahasiswa, namun dalam ruang-ruang yang dianggap aman. Keterlibatan saya dengan diskusi-diskusi tentang politik Orde Baru di Jakarta dimulai ketika saya dilibatkan dalam kelompok diskusi yang terdiri dari beberapa alumni maupun mahasiswa UI ataupun anggota LSM di Jakarta. Salah satu yang mengajak saya adalah Fauzi Abdullah dan Santoso Suwandi yang keduanya alumni Fakultas Sastra UI. Saat itulah, sebagai orang yang termuda dalam kelompok tersebut, saya mulai ikut diskusi tentang politik di tingkat nasional maupun lokal.

Dengan adanya pengontrolan ketat terhadap berbagai kegiatan yang dianggap dapat membahayakan kekuasaan negara Orde Baru di berbagai tingkat, pertemuan-pertemuan pun diadakan di tempat-tempat yang tidak terbuka ataupun di Lembaga yang sedikit mendapat perlindungan karena merupakan bagian dari jaringan lebih diawasi oleh HAM internasional dan tidak terlalu mudah menjadi sasaran pemeriksaan dan penahanan oleh aparat militer. Saat itu, gedung LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta, yang terletak di Jalan Diponegoro, Menteng, merupakan ruang yang relatif aman untuk bertemu dan berdiskusi tentang situasi politik. Selain itu, sering pula berbagai pertemuan untuk membicarakan situasi politik, dilakukan di rumah-rumah pribadi dengan dalih 'arisan' atau 'pertemuan kekeluargaan'.

Fauzi Abdullah² yang saat itu bekerja di LBH, secara rutin mengadakan pertemuan-pertemuan tersembunyi

dengan buruh-buruh pabrik di berbagai lokasi, untuk mendengarkan cerita-cerita mereka yang bekerja di pabrik-pabrik industri, terutama dalam periode Serikat Buruh yang diakui hanya yang langsung di bawah pengawasan pemerintahan Orde Baru. Tujuan mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut adalah untuk secara bertahap mengembangkan kesadaran kelas, yang tak begitu saja menerima eksploitasi tenaga kerja di tingkat pabrik maupun di tingkat desa.

Dalam Peraturan Menteri Nomor 342 Tahun 1986, antara lain disebutkan bahwa aparat keamanan (pada berbagai tingkatan struktur pemerintahan) bekerja sama dengan pemerintah daerah, pejabat perusahaan, dan “mediator perburuhan” berwenang untuk terlibat dalam penyelesaian perselisihan untuk mencegah terjadinya pemogokan dan perusakan fisik oleh pekerja. Dalam banyak kasus, peran aparat keamanan bisa melakukan intervensi dalam kasus perselisihan perburuhan, meskipun perselisihan tersebut sama sekali tidak melibatkan pemogokan atau perusakan fisik. “Pengawasan” yang dimaksud adalah kehadiran aparat militer dalam negosiasi antara pekerja, manajemen, dan Departemen Tenaga Kerja (Rudiono 1992, hlm. 65).

Walaupun saya sudah mulai terlibat dalam diskusi-diskusi yang dilakukan bersama Fauzi dan aktivis lainnya, namun tahun 1981—1983 saya mendapat beasiswa untuk belajar ke negeri Belanda (di Universitas Leiden) terutama untuk mempersiapkan studi S2 saya. Melalui kerja sama Departemen Pendidikan Indonesia dan Belanda, beberapa mahasiswa antropologi dan sejarah selama beberapa tahun dikirim ke Belanda menggunakan arsip-arsip tentang Indonesia yang ada di Belanda. Universitas Leiden saat itu amat konservatif dan pendekatan antropologinya juga lebih menggunakan pendekatan struktural-fungsionalis yang amat statis dan non-politis. Kerja sama institusional ini berjalan beberapa tahun dan tema penelitian pun secara langsung maupun tidak langsung masuk di dalam sistem pengawasan institusional terutama dari pihak lembaga pendidikan di Indonesia, termasuk Universitas Indonesia. Namun saya saat itu, di negeri Belanda, sudah mulai banyak berhubungan dengan para pengajar dan peneliti dari *Institute of Social Studies* di Den Haag dan Universitas Amsterdam, yang stafnya mempunyai pendekatan kritis mengenai *Development Studies*. Saya juga mulai berkenalan dengan anggota staf majalah INDOC yang melaporkan situasi politik di Indonesia secara rutin, maupun jaringan *Komite Indonesia*, yang mengadakan kegiatan-kegiatan dengan komunitas Indonesia dan non-Indonesia di Amsterdam mengenai berbagai pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Saat kembali dari Belanda, dalam salah satu diskusi bersama kelompok diskusi yang sebelumnya sudah saya ikuti secara rutin, Fauzi (atau ‘Oji’) , yang saat itu amat terlibat dengan kaum buruh mengajak saya untuk ikut diskusi-diskusi di kalangan kaum buruh perempuan di sekitar Jakarta-Bogor. Ia menyadari bahwa para buruh perempuan mengalami berbagai situasi yang tidak diangkat oleh aktivis buruh lelaki. Mereka merasa lebih bisa bicara apabila topik yang mereka bawa ke permukaan, tidak menjadi bahan ledakan atau tertawaan para buruh lelaki ketika mengangkat masalah yang menyangkut hak cuti haid dan cuti hamil, maupun pelecehan seksual yang mereka hadapi oleh mandor atau staf pimpinan perusahaan maupun oleh kaum buruh lelaki yang ada di perusahaan yang sama.

Saat itu, muncul inisiatif pertama untuk mengadakan diskusi bersama kaum buruh perempuan untuk membicarakan persoalan-persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Terutama cerita soal jam kerja yang panjang, upah yang tidak sesuai dengan upah minimum, kelakuan kasar oleh staf perusahaan dan juga kekerasan seksual. Namun, selain itu juga persoalan domestik yang mereka hadapi. Sebelumnya sudah ada diskusi-diskusi di antara kaum buruh laki maupun perempuan bersama-sama di ruang-ruang tertutup atau di gedung LBH di Jakarta, tetapi pertemuan dengan kaum buruh perempuan diadakan secara terpisah.

Berhubung jaringan yang telah dikembangkan oleh Fauzi Abdullah sudah mencakup berbagai daerah, yaitu Tangerang, Serpong, Ciputat, Karawang, maka diskusi-diskusi dilakukan di lokasi-lokasi tersebut melalui pertemuan-pertemuan kecil yang tidak terlalu mencolok dan diberi judul ‘arisan’.

Kasus dalam Diskusi dengan Para Buruh Perempuan Kasus Kekerasan Seksual

Beberapa kasus yang saya muat dalam catatan harian yang saya tulis saat itu, terutama menyangkut masalah-masalah yang dihadapi kaum buruh di pabrik sekitar Jakarta Raya maupun Jawa Barat. Satu contoh adalah kasus perempuan di pabrik ban Tangerang³ ketika ada seorang buruh perempuan berumur 18 tahun dihamili oleh pengawas dari pabrik ban tersebut. Sebenarnya perempuan ini terkena rayuan orang itu dan pada mulanya laki-laki tersebut berjanji untuk ambil tanggung jawab. Perempuan itu pernah menuntut uang dari laki-laki tersebut untuk menjalankan abortsi tetapi ia tidak juga mendapatkannya. Laki-laki tersebut mengatakan bahwa ia telah memberikan Rp80.000,00 melalui seorang Satpam tetapi ternyata uang itu tidak

pernah sampai ke perempuan itu. Perempuan ini berasal dari Sumedang, ayahnya sudah meninggal, dan ibunya sudah tahu mengenai situasinya dan pernah datang mengunjunginya yang saat itu tinggal di rumah salah satu aktivis buruh perempuan. Ibunya hanya memiliki satu kekhawatiran: pada dasarnya tidak mau menerima cucunya (kalau sudah lahir) di rumahnya, dengan mengatakan: 'apa kata tetangga nanti?' Perempuan itu kemudian sudah tidak bekerja lagi dan pernah pada suatu saat ingin bunuh diri. Walaupun kemudian ia bisa menerima situasinya, namun masalahnya, ia ingin kalau anaknya lahir nanti diserahkan untuk diadopsi.

Cerita lain yang dialami perempuan desa adalah adanya organisasi-organisasi yang mencari gadis-gadis desa untuk dipekerjakan di kota. Pernah di desanya, di Pacitan, ada orang-orang yang datang dengan mobil bagus, mencari orang yang mau dibawa ke kota untuk bekerja. 'Yang diambil untuk bekerja tentu yang manis-manis' kata Inem. Gadis-gadis tersebut biasanya mau karena merupakan kesempatan mencari penghasilan. Inem tahu ada empat orang yang dibawa ke kota. Ternyata mereka dimasukkan ke dunia pelacuran, di luar kemauan mereka sendiri. Orang tua tahu melalui surat tertulis dan menangis terus, tak sangka bahwa anak mereka akan 'dibegitukan'.⁴

Ketimpangan Sosial di Ruang Pabrik dan di Ruang Domestik

Di pabrik, cara perusahaan mengontrol buruh dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui pengontrolan Serikat Buruh (kalau di pabrik disebut 'basis') dengan memberi kenaikan upah pada buruh yang militan dalam upaya membungkam mereka, menciptakan ketegangan di antara kaum buruh sendiri, ataupun menjaga agar mereka yang berasal dari daerah yang sama tidak dimasukkan di seksi pabrik yang sama (untuk mencegah munculnya solidaritas di antara mereka). Di satu pabrik ban sepeda, produksi dilakukan dengan sistem borongan dan sistem target. Bila buruh tidak mencapai target, maka buruh pun tidak mendapat uang premi hadir. Tetapi anehnya, keadaan ini tidak merata. Di bagian lain, buruh terus mendapat uang premi, walaupun sistem target terus diberlakukan. Menurut seorang buruh, kadang di bagian itu target tidak selalu dicapai.⁵

Di suatu perusahaan konveksi, seorang buruh perempuan mengalami mutasi ke bagian keamanan karena sering membangkang. Di bagian keamanan, ia lebih gampang diawasi. Satu saat ia mau pulang kampung 3 hari, tetapi tidak boleh. Cuti pun tidak

boleh. Akhirnya diberi izin 3 hari tetapi di belakang surat ditulis: kalau terlambat, akan diberi gaji sebagai buruh baru. Karena situasi kesehatannya, ia terlambat kembali satu hari dan walaupun berhasil mendapatkan surat dokter, situasinya tetap tidak diakui Perusahaan. Gajinya mingguan dan menjadi lebih kecil. Dibanding buruh lainnya di bagian keamanan, ia juga mendapatkan lebih sedikit. Dari beberapa cerita ini, hierarki dan diferensiasi di kalangan buruh sendiri nampaknya merupakan satu strategi dari perusahaan untuk mencegah terbentuknya rasa solidaritas di antara mereka.

Diskusi-diskusi rutin yang kami lakukan di lokasi-lokasi yang berbeda ini menunjukkan berbagai persoalan yang kaum buruh perempuan hadapi, bukan hanya di tempat kerja tetapi juga di keluarga mereka. Misalnya, bagaimana upah yang mereka diperoleh diserahkan ke suami atau orang tua dan mereka sendiri tidak bisa menikmati hasil jerih payah mereka sendiri. Terlalu banyak cerita tentang situasi seperti ini, tetapi keterkaitannya saat itu tidak menjadi bahan diskusi kelompok-kelompok aktivis perburuhan.

Semenjak akhir tahun 1970-an, akademisi maupun aktivis feminis di dunia Barat telah menerobos lensa biner yang memisahkan rumah tangga dan tempat kerja sebagai ruang yang terpisah, dengan argumen bahwa kedua ruang tersebut saling terkait erat dan saling memengaruhi dinamika masing-masing.

Sebagaimana dikatakan Lamphere, Zavella, Gonzales, & Evans (1993) baik ahli antropologi maupun sejarah telah meneliti peran pekerja perempuan di tempat kerja tanpa melihat bagaimana ini memengaruhi hubungan di dalam keluarga. Perempuan pekerja yang telah berkeluarga mengalami berbagai kontradiksi peran dan konflik yang sering muncul dalam ketelindanan berbagai peran, sebagai pekerja, ibu, dan istri.

Dibentuknya Kalyanamitra

Dari cerita-cerita kaum buruh perempuan baik dari kisah-kisah kekerasan seksual yang terjadi, dalam ruang domestik, tempat kerja atau ruang publik, maupun ketidakadilan dalam pemberian upah di tempat kerja, muncul ide untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa mengangkat persoalan-persoalan ini secara lebih sistematis dan kolektif. Dalam periode Orde Baru, organisasi perempuan yang dibentuk saat Pemerintahan Soeharto, seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, PKK, Kowani semuanya merupakan kooptasi rezim Orde Baru untuk 'menjinakkan' kaum perempuan. Masalah yang amat dirasakan juga adalah peran aparat keamanan

dalam upaya mengendalikan kemungkinan buruh melakukan perlawanan. Bahkan apabila kaum buruh kumpul-kumpul bersama di rumah kontrakan, maka acapkali diawasi oleh tokoh-tokoh lokal dan dilaporkan ke polisi setempat.

Tanpa organisasi yang terstruktur, kekuatan untuk mengangkat isu ketimpangan upah atau penumpasan hak-hak buruh saat itu tidak akan mungkin dilakukan. Muncullah ide untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa menjadi landasan gerakan perempuan yang lebih meluas baik di tingkat nasional maupun lokal. Berbagai usulan diberikan menyangkut individu yang perlu dilibatkan dan akhirnya bersama-sama Myra Diarsi, Sita Aripurnami, Debra Yatim, Sjarifah Sabarudin, kami mendirikan Kalyanamitra.

Pada periode ini, dukungan dari organisasi-organisasi di tingkat internasional dan dengan adanya *UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) tahun 1979, memberi landasan bagi pembentukan berbagai organisasi non-pemerintah yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Saat itu, organisasi perempuan yang telah terbentuk sebelum Kalyanamitra adalah Yayasan Annisa Swasti pada tahun 1982 yang juga memusatkan kegiatan terutama pada kondisi buruh perempuan. Dengan didirikannya Kalyanamitra, ide awal adalah justru untuk mengangkat persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan baik kelas bawah maupun kelas atas, dalam ideologi hegemonis Negara ke permukaan agar memperkuat gerakan perempuan yang kuat. Hal ini diawali dengan mengumpulkan cerita sehari-hari mengenai ketimpangan gender yang terjadi, menyebarkan dalam bentuk tulisan-tulisan yang mudah dibaca, dan juga untuk memperkuat kegiatan advokasi menentang atau melawan rezim Orde Baru yang represif. Dari pengalaman-pengalaman ini, keterlibatan para pendiri dan pengurus Kalyanamitra yang lainnya dalam masalah-masalah politik yang mempunyai efek terhadap kaum perempuan baik dari kelas, etnisitas maupun agama yang berbeda, maka gerakan perempuan untuk keadilan bisa terus diperjuangkan baik dalam bentuk advokasi langsung, melalui gender training, ataupun dalam bentuk bantuan politik maupun sosial bagi para korban kekerasan.

Walaupun saya sendiri saat ini tidak berbasis di tanah air, namun keterlibatan saya dengan isu gender tetap bertahan sebagai akademikus maupun aktivis, baik melalui dunia kampus (sebagai mantan dosen), maupun jaringan sosial untuk buruh migran Indonesia di negeri Belanda, sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen)

IMWU (Indonesian Migrant Workers Union) dan juga perkumpulan (Watch '65) yang mengangkat isu genosida 1965 dan kehidupan para eksil Indonesia di Belanda.

Gender Training: Dinamika Wacana Gender dalam Upaya Melawan Ideologi Hegemoni Gender (Narasi oleh Myra Diarsi)

Keterlibatan dengan Isu Gender dan Gerakan Perempuan

Berjalan 5 tahun menggiatkan Kalyanamitra sejak 1984 dan memilih bidang pendidikan & pengembangan pengetahuan maupun praksis feminisme, saya didesak seorang pejabat Kedutaan Belanda untuk mengambil Master Degree Development Studies pada Institute of Social Studies (ISS) di The Hague Belanda yang belum lama membuka spesialisasi *Women & Development*. Masa itu, saya sedang giat-giatnya berkelana *blusukan* ke pelosok Nusantara hingga perdesaan, belajar mengenali realitas sosial perempuan sembari merontokkan “kemenaragadingan” sebagai lulusan Universitas Indonesia yang kenyang dijejali teori dan konsep-konsep. Sungguh sedang tidak bersemangat dengan dunia akademik. Namun, Jose meyakinkan bahwa sekolah di ISS ini justru diperlukan oleh aktivis “praktisi Pembangunan” dan juga akan bertemu dengan aktivis-aktivis gerakan sosial dari berbagai negara.

Menghargai “rayuan” tersebut, selain mencari keterangan tentang ISS, saya mengambil langkah mendaftar dan ternyata diterima. Boleh jadi dengan bantuan “lobby” dari kawan-kawan akademikus di ISS maupun Belanda secara umum. Informasi mengenai ISS yang saya peroleh dari alumnus memang cukup menjanjikan. Akhirnya, bersemilah hasrat berjumpa dengan sesama aktivis yang pada kurun itu dikenal dengan “dunia ketiga”. Alangkah senangnya! Lagi pula, Belanda bukan asing bagi saya yang sejak belia ikut-ikut ibu membaca majalah terbitan Belanda yang rutin dikirim oleh kerabat yang sejak 1966 telah bermukim di Negeri Keju dan Kincir Angin itu.

Singkat kata, pengalaman 20 bulan (September 1989–April 1990) sungguh luar biasa. Bergumul dengan *papers* dan buku bacaan yang tidak biasa digunakan bahkan di lingkungan saya sebagai dosen di UI, namun telah terdengar dan menjadi impian aktivis untuk memahaminya. Berdiskusi dengan para guru yang kebanyakan juga *scholar-activists* baik di kelas maupun pada kesempatan eksposur lainnya. Setelah *jumpalitan* menulis makalah sebagai asesmen hasil penyerapan diskursus Pembangunan–tidak ada test/ujian evaluatif–

pada ujung sesi untuk tingkat pascasarjana bergelar Master of Arts ini, menyusun tesis sebagai ukuran “sudah sekolah” di Den Haag.

Isu tesis saya adalah “konstruksi ideologi gender perempuan Indonesia” yang mewujud pada substansi belajar siswa Sekolah Dasar, terutama di buku salah satu mata pelajaran pokok yaitu Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Siswa harus mendapat nilai minimum untuk mata pelajaran pokok sebagai syarat kenaikan kelas. Dengan meneliti *content analysis*, saya menemukan bahwa melalui buku-buku pelajaran para siswa Sekolah Dasar telah diajarkan pengetahuan tentang bagaimana nilai, karakter, serta peran untuk menjadi perempuan. Besar kemungkinan bahwa pembentukan identitas atas dasar gender tersebut tentu juga gencar disosialisasikan lewat cara pengajaran kelas oleh para guru, walaupun ini tidak menjadi fokus penelitian saya. Isi pelajaran buku PMP juga menguak adanya interseksi kelas sosial-ekonomi dan agama dalam memengaruhi hubungan yang hierarkis antara perempuan dan laki-laki, istri dan suami.

Hal ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan institusi utama pengkonstruksi gender setelah keluarga sejak seorang anak dilahirkan. Semakin melanjutkan sekolah dan bertumbuh dewasa, aturan sosial dan kultural khususnya kepada perempuan akan semakin terasa mempersempit wilayah gerak serta kebebasan menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Umum diketahui bahwa keluarga miskin lebih mendahulukan anak lelaki masuk sekolah formal ketimbang anak perempuan, dengan anggapan anak laki-laki kelak akan memberikan nafkah keluarga, sedangkan anak perempuan akan diambil istri oleh laki-laki dan masuk dapur juga. Meskipun pada kenyataannya semakin banyak perempuan berkarier di dunia kerja, peran dan kedudukan mereka di masyarakat tetap kental kaidah 3 M, yaitu *masak* (memasak), *macak* (bersolek), dan *manak* (melahirkan anak). Cukup kerap terdengar sindiran dan cemooh kepada perempuan yang ‘kurang berhasil’ pada urusan 3M tersebut, bahkan diperkeras dengan anjuran agar tidak terlampau serius menggapai pendidikan tinggi demi tidak terganggunya kewajiban mengurus rumah tangga sebagai “kodrat” perempuan.

Kodrat sebagai hegemoni gender. Hegemoni adalah istilah yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci (1935) untuk menjelaskan suatu proses dengan apa penguasa superior menjamin *consent* kebersetujuan kaum tertindas atas sistem yang menindas dan mensubordinasikan mereka. Tanpa penggunaan kekuatan represif seperti tentara, sang elite penguasa

mengendalikan melalui lembaga-lembaga pendidikan, agama, serta media, memastikan bahwa hubungan gender yang hierarkis antara perempuan dan laki-laki itu alamiah, “dari sononya” dan oleh karenanya tidak dapat diubah. Gramsci juga menegaskan bahwa tidak ada ‘jaminan’ yang mutlak untuk kebersetujuan tersebut, tidak mungkin pasti mujarab untuk semuanya sehingga selalu ada ruang untuk resistensi dan penolakan melalui kerja-kerja *counter hegemonic*. Oleh karenanya, perlu dihidupkan kesadaran yang menantang gagasan kodrat yang dipakai sebagai hegemoni gender dan salah satu strategi gerakan perempuan adalah membudayakan perspektif gender.

Metode Pelaksanaan Gender Training dan Strategi Mengembangkan Pemikiran Kritis Gender

Pulang dari sekolah kembali ke tanah air dan melanjutkan bergiat di Kalyanamitra, temuan tesis dilanjutkan menjadi program pendidikan Kalyanamitra. Pelatihan Analisis Gender merupakan salah satu strategi penolakan ideologi hegemonis Orde Baru.

Program terdiri atas: 1) tingkat dasar atau Pelatihan Gender Sensitif yang menjelaskan konsep dan teknis analisis gender, serta 2) tingkat lanjut atau *Gender Analysis Training of Trainers* (GAToT) yang memungkinkan partisipan melatih dan menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan kelompok sasarannya. Tujuannya menyebarluaskan gagasan dan pemahaman gender secara intensif.

Pelatihan Gender Kalyanamitra dilaksanakan sedikitnya selama tiga hari hingga enam hari penuh. Dimulai pada tahun 1991, Kalyanamitra telah menyelenggarakan pelatihan menyeluruh ke berbagai wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah sampai ke Timur. Peserta training pada umumnya adalah aktivis Lembaga non-Pemerintah (LSM), baik mereka yang bekerja di lapangan maupun staf di kantor serta di tingkat pengambil keputusan. Dari kalangan universitas, biasanya mereka yang terlibat dengan Pusat Studi Wanita (PSW)—yang baru kemudian berganti nama menjadi Pusat Studi Gender (PSG)—di fakultasnya, dosen, serta mahasiswa ilmu sosial yang menaruh perhatian pada masalah gender dan pembangunan. Setiap training selalu diikuti oleh peserta perempuan dan laki-laki, walau rata-rata yang perempuan lebih banyak daripada peserta laki-laki. Dengan catatan menarik, biasanya peserta laki-laki merupakan posisi manajer/direktur pengambil keputusan. PSW sendiri baru bermunculan di sejumlah Universitas Negeri pada kurun waktu tersebut dan belum fasih mempercakapkan diskursus gender

dibandingkan dengan para aktivis feminis yang bergiat di organisasi non-pemerintah. Secara lebih khusus, pelatihan analisis gender kemudian dikembangkan berdasarkan permintaan untuk profesi tertentu, seperti guru, jurnalis dan kalangan media, serta beragam sektor pekerjaan, seperti petani, buruh industri, perkebunan, transportasi, hingga sektor jasa.

Kurikulum pelatihan terutama mengupas program-program pembangunan dengan perspektif berpihak kepada kaum perempuan. Selain mengenal—memahami gender dan mengapa gender dipermasalahan di dalam konteks pembangunan, peserta juga dilatih agar terampil membuat penilaian atas program-program & kegiatan pembangunan LSM, mana yang telah “peka gender”, dengan menggunakan matra pengukuran gender maupun sebaliknya. Hal ini belum termasuk pencapaian keterampilan psikologis-komunikasi yang biasanya merupakan hasil ikutan dari keikutsertaan dalam suatu training, khususnya bagi peserta perempuan, seperti keberanian dan keterampilan mengemukakan pendapat, berargumentasi, dan lain sebagainya.

Hal yang juga penting dikemukakan tentang pelatihan Analisis Gender adalah metode belajarnya. Pada dasarnya, metode dan kurikulum bervariasi pada setiap latihan, disesuaikan dengan kebutuhan dan watak pekerjaan/kegiatan serta latar belakang kultural peserta. Juga waktu dan tempat yang tersedia. Berbagai teknik pelatihan, seperti pembahasan kasus, tatap muka dengan narasumber, diskusi kelompok besar/pleno dan kecil, simulasi (permainan/games, pemeranan/roleplay), serta pemutaran video hingga penjelajahan lapangan disusun menjadi satu paket pelatihan. Susunan sedemikian rupa agar para peserta dan pelatih bersama-sama meneropong “masyarakat pembangunan” dan bagaimana gender dimaknakan dengan asumsi bahwa gender merupakan faktor krusial dalam merencanakan dan mengimplemantasikan program Pembangunan.

Bersamaan dengan maraknya aktivitas Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengambil sikap anti-pemerintah otoritarian Soeharto pada awal periode 1990-an, semakin berkembang pula pemikiran-pemikiran kritis para *Indonesianist* yang banyak dibahas pada kesempatan diskusi/lokakarya maupun seminar. Begitu juga kalangan aktivis feminis, dominasi dan kendali terhadap masyarakat sipil oleh rezim Orde Baru dalam wujud ideologi gender melalui Dharma Wanita dan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dikritisi.

Temuan-temuan yang Menarik di Dalam Diskusi Kelompok

Dalam diskusi kelompok, muncul sejumlah temuan menarik yang memperlihatkan dinamika pemahaman dan strategi advokasi gender pada masa itu. Salah satu yang banyak dibahas adalah kasus pembunuhan Marsinah, seorang buruh perempuan di Sidoarjo yang tewas pada tahun 1993 setelah memimpin aksi demonstrasi. Selain advokasi menuntut pelaku ke pengadilan, pembahasan kasus ini pada Training Analisis Gender dijadikan simulasi “Jaring Laba-laba Kekuasaan” untuk memahami tindak kekerasan berbasis gender struktural yang dibiarkan oleh Negara. Simulasi ini mudah dimengerti peserta sebagai kait kelindan berbagai faktor penindasan dan kekerasan, termasuk kepentingan politik yang mendasarinya. Simulasi “Jaring Laba-laba” ini tetap digunakan dalam pelatihan hingga kini, dengan berbagai kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Temuan menarik lainnya adalah kenyataan bahwa istilah ‘gender’ benar-benar sangat baru untuk sebagian besar peserta. Beberapa peserta di wilayah Jawa malah mengelirkannya dengan ‘gender’ yang mereka kenali yaitu salah satu bentuk alat musik gamelan ataupun ‘gendar’ nama salah satu jenis kerupuk. Jadi pada awalnya, fasilitator mesti mampu menjelaskan maknanya secara tidak keliru. Sejumlah anekdot mencerminkan proses pemahaman ini.

Di Maumere, misalnya, seorang mama penunun berseru gembira setelah mendengar penjelasan gender “*ah sudahlah, susah menyebutnya tapi kami paham benar yang dimaksudkan. Karena kami mengalaminya sehari-hari*”.

Di Sumatra Utara, seorang wakil direktur LSM yang awalnya bersikap congkak saat datang terlambat ke pelatihan menegurku dengan nada meremehkan: “Omong apa ini, Dik? Macam apa kali? Kujawab tenang: “Ya, Abang duduk baik dulu dan mendengarkan, nanti bisa merespons setelahnya, tak soal setuju atau tidak setuju, bolehkah?” Pada hari ke-3 pagi-pagi setelah 2 hari sebelumnya mengikuti penuh diskusi dan simulasi, dia menyatakan: “Aku paham sekarang gender ini dan betul baik sekali... tetapi untuk anak gadisku, ya, untuk istriku jangan!” yang meledakkan tawa kami dan semua peserta.

Kisah serupa bukan satu-satunya karena pada kesempatan lain di Lombok, seorang bapak baru “kena” paham saat kutanyakan sekiranya putrinya mengalami perbedaan perlakuan karena ia perempuan. Pendekatan kepentingan personal yang riil dalam

kehidupan sehari-hari kupelajari cukup jitu untuk memengaruhi kepedulian pada diskriminasi maupun penindasan terhadap perempuan.

Dari ranah pemahaman dasar ini, pelatihan kemudian bergerak ke level yang lebih luas. Dalam konteks yang lebih luas, menantang asumsi dan pandangan umum bahwa *boleh perempuan bekerja dan berkarier asal tidak melupakan kodrat keibuannya serta tanggung jawab terhadap keluarga dan rumah tangganya* perlu menampilkan data statistik perempuan kepala keluarga, selain hasil penelitian seluruh *jam kerja aktif* perempuan (termasuk tugas domestik) setiap harinya. Dari sini lahir istilah populer bahwa jam kerja perempuan berlangsung “dari matahari belum terbit sampai mata bapak tenggelam,” yang membuka mata banyak peserta terhadap beban kerja yang tidak terlihat.

Proses penyadaran ini juga menghadapi tantangan khas di wilayah Timur Indonesia, seperti Maluku dan Papua, bahwa narasi lokal tentang peran gender kerap dipengaruhi oleh ceramah-ceramah keagamaan yang bersifat hegemonik. Ungkapan seperti: “perempuan memang bukan kepala, *dong*, mereka hanya tulang rusuk”, sering kali diulang tanpa kritik. Dalam konteks seperti ini, fasilitator harus mengembangkan strategi kontra-narasi yang kontekstual, seperti menjawab, “Betul, pace dan mace, tetapi tanpa tulang rusuk itu kepala tak bisa tegak,” sebuah respons sederhana namun kuat untuk menggoyang pemahaman yang menormalisasi ketimpangan.

Upaya memperluas pemahaman peserta tidak berhenti pada diskusi lisan. Untuk memperkaya perbendaharaan pengetahuan dan memperdalam kesadaran kritis, Kalyanamitra secara khusus menyiapkan bahan bacaan yang memuat karya sejumlah aktivis/akademisi dari dalam maupun luar negeri, yang menyoroti konteks Indonesia dan/atau Asia. Belasan teks ini dibundel dan dibagikan kepada seluruh peserta, mencakup topik mulai dari kajian tentang Negara Orde Baru dan transformasinya dalam ideologi, hegemoni, dan resistensi; peta organisasi non-pemerintah di Indonesia; kajian gender dan politik; pemikiran dan sejarah feminisme; ibuisme negara; patriarki dan seksualitas; telaah pendidikan kritis; filsafat pedagogi; metode penyadaran; organisasi perempuan di Indonesia; hingga format alat analisis gender. Perpaduan antara pengalaman lapangan, strategi kontra-hegemoni lokal, dan fondasi teoritik inilah yang memperkuat proses pembelajaran dalam pelatihan, menjadikannya lebih kontekstual, reflektif, dan memberdayakan, senada dengan pemikiran bell

hooks (1994) tentang pedagogi kritis yang menekankan keterhubungan antara pengalaman konkret dan teori sebagai dasar pembelajaran yang membebaskan, serta gagasan Patricia Hill Collins (1990) mengenai pengetahuan yang terletak (*situated knowledge*), yaitu pengalaman perempuan menjadi sumber penting bagi produksi pengetahuan feminis yang transformatif.

Pengalaman pelatihan analisis gender yang dirintis Kalyanamitra menunjukkan bagaimana proses penyadaran kritis dapat tumbuh dari pertemuan antara pengalaman hidup perempuan, strategi kontra-hegemoni lokal, dan kerangka teoritik feminis. Namun, perubahan kesadaran saja tidak cukup tanpa artikulasi politik yang lebih luas. Di titik inilah, kerja-kerja pendidikan gender bertemu dengan medan perjuangan yang lebih terbuka: ruang gerakan sosial yang menantang hegemoni negara Orde Baru secara langsung. Perjalanan itulah yang tampak dalam pengalaman Ruth Indiah Rahayu berikut ini.

Menghadapi Kekerasan Negara Menuju Gerakan Pro-Demokrasi (Narasi oleh Ruth Indiah Rahayu)

Perkembangan Subjektifitas Pribadi Menuju Kesadaran Feminis

Saya bergabung dengan Kalyanamitra sejak 1995 dan pada waktu itu disertai pekerjaan untuk mengadministrasi pelatihan gender yang dikelola oleh Myra Diarsi dan Lies Marcoes. Manager atau direktur Kalyanamitra dijabat oleh Ita F. Nadia menggantikan Sita Aripurnami yang kemudian menempuh pendidikan S2 di Inggris.

Sebelum saya bergabung dengan Kalyanamitra, saya cukup aktif di kelompok studi atau diskusi perempuan untuk memahami tentang kapitalisme—patriarkisme—militerisme sebagai kerangka besar untuk memahami persoalan perempuan. Dua aspek yang menjadi ketertarikan saya sebagai anak produk Orde Baru terhadap ‘persoalan perempuan’ (*women’s question*), yaitu depolitisasi organisasi perempuan dan kemiskinan buruh perempuan perkebunan. Tentu di atas semua itu, saya tertarik dengan ide gerakan emansipatoris. Mengapa demikian?

Saya akan memulai cerita dari tiga buku yang menjadi jiwa internal saya untuk *ngaktivis*, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang kumpulan tulisan Kartini yang saya baca pada saat masih murid sekolah dasar, *Sarinah* karya Soekarno, dan *Max Havelaar* karya Multatuli yang saya baca saat sudah duduk di sekolah menengah pertama. Ketiga buku itu mempunyai peranan masing-

masing dalam membentuk imajinasi saya tentang 'persoalan penindasan' dan emansipasi. Dari tulisan Kartini, saya terpengaruh untuk menjadi perempuan yang emansipatoris dan mampu menulis. Dari *Sarinah*, dengan pemahaman saya yang masih dangkal saat itu, saya sangat terkesan oleh kisah para perempuan dalam gerakan emansipasi di Prancis dan Belanda, termasuk penjelasan mengenai asal-usul patriarkisme. Sementara dari *Max Havelaar*, saya mendapatkan penggambaran yang begitu kuat tentang eksploitasi kolonial terhadap petani—sebuah kisah yang menyentuh saya begitu dalam hingga membuat saya menangis saat membacanya.

Selain itu, ada dua orang perempuan yang sebenarnya aktivis perempuan pada masanya, yaitu ibu dan eyang yang bungkam selama masa Soeharto masih memimpin Orde Baru. Saya baru mengetahui setelah reformasi bahwa ibu saya adalah aktivis *Wanita Demokrat Indonesia* (WDI) atau disebut juga *Wanita Marhaen* yang berafiliasi dengan PNI Soekarno. Sementara, saya baru bertemu dengan eyang setelah ia mendekam selama 14 tahun di penjara perempuan di Plantungan, Kendal, Jawa Tengah dan dipulangkan pada awal 1980. Ternyata eyang adalah pengurus *Gerwani* Cabang Surabaya yang ditangkap oleh militer dalam masa "Tragedi 1965". Kedua perempuan yang saya hormati ini dan juga dalam keluarga besar dari garis ayah dan ibu, bersepakat untuk menutup rapat sejarah keluarga yang dianiaya oleh Orde Baru. Keluarga besar kami memang keluarga 'merah', yang mayoritas laki-lakinya masuk penjara dan menjadi eksil di luar negeri. Untuk itu, saya diminta pula untuk bungkam tanpa menulis apa pun tentang masing-masing, demi masa depan generasi anak cucu, terutama para laki-laki yang saat itu sedang menapaki karier di departemen-departemen negara.

Kembali kepada spirit emansipasi dari tiga buku tadi, saya memperoleh penjelasan ilmiah mengenai pembagian kerja secara seksual—yang disebut Soekarno dalam *Sarinah*—setelah membaca *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis* (1985) karya Arief Budiman. Setelah beberapa tahun dari membaca buku ini, saya dapat membaca buku tentang asal usul penindasan perempuan yang ditulis Friedrich Engels *The Origin of the Family, Private Property and State* (1884) yang pada 2004 diterbitkan oleh Kalyanamitra—setelah terlantar beberapa lama.

Pada masa itu, memperoleh buku bacaan dari luar merupakan suatu kemewahan, tetapi di masa Orde Baru tulisan ilmiah populer yang disajikan Jurnal

Prisma merupakan rujukan kritis yang menyegarkan dahaga akan kajian emansipatoris. Masih saya ingat, *Prisma* pernah mengeluarkan edisi khusus tentang kajian perempuan—belum disebut kajian gender—sesudah Indonesia mengikuti Konferensi Perempuan Sedunia 1 di Mexico City pada 1975. Para penulis perempuan, seperti Mely G. Tan, Mayling Oey, Kartini Sjahrir, Saparinah Sadli, Yulfitra Rahardjo, dan lainnya membeberkan hasil penelitian tentang kondisi perempuan dalam pembangunan dan juga kajian dari aspek budaya. Sejalan dengan itu, saya mengkaji tulisan-tulisan mengenai 'pribumisasi ilmu-ilmu sosial' atau upaya dekolonialitas ilmuwan sosial, seperti Sartono Kartodirdjo di bidang ilmu sejarah, Mubyarto di bidang ilmu ekonomi, dan tulisan *public scholar*, seperti Daniel Dhakidae, Ignas Kleden, Soedjatmoko, Mochtar Pabottingi (LIPI), dan lainnya. Dari upaya dekolonialitas ilmu sosial ini, lahir pula terminologi 'ilmu-ilmu sosial transformatif'. Seingat saya, pernah diadakan konferensi mengenai ilmu-ilmu sosial transformatif di Malang yang melibatkan peneliti dari LIPI, *public scholar*—apalagi yang baru merampungkan S2 dan S3 dari luar negeri—aktivis LSM dan mahasiswa.

Upaya emansipatoris di bidang ilmu sosial ini menurut saya, penting sebagai pendasaran gerakan emansipasi dari otoritarianisme Orde Baru. Saya menganggap Kalyanamitra adalah sarana yang cukup radikal suaranya untuk melakukan emansipasi demokratik yaitu mengemansipasi hak perempuan sebagai warga negara yang tertindas di bawah patriarkisme Orde Baru.

Pembentukan Agensi Feminis Melalui Pelatihan Gender

Awal berkantor di Kalyanamitra di Jalan Sebet, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, saya senang sekali melihat kantor Kalyanamitra memiliki perpustakaan yang berisi aneka macam buku, dokumen hasil penelitian, dan terbitan lainnya. Saat itu, Kalyanamitra mempunyai media bernama *Dongbret* yaitu komik yang menggambarkan tentang persoalan perempuan. Seingat saya, ada topik tentang pekerja rumah tangga, pekerja seks, dan lainnya, tetapi pada saat saya di sana, produksi *Dongbret* sudah terhenti. Lalu ada *Mitra Media* yang dikelola Liza Hadiz. Sejujurnya saya tertarik mengelola media karena saya juga bekerja sebagai reporter bebas, tetapi oleh Kalyanamitra saya dipekerjakan sebagai staf untuk mengadministrasi pekerjaan training gender.

Ini pertama kali saya mengenal istilah 'gender' disandingkan dengan konsep *empowerment* dalam

perspektif pembangunan. Sebagai pemula yang junior dan ‘bernuansa kedaerahan’, saya berusaha belajar cepat untuk memahami materi-materi yang ada dalam training gender. Saya mempelajari pula bagaimana gaya Myra dan Lies menjadi fasilitator, pun menyusun modul pelatihan. Ada tiga pertanyaan dasar yang saya ingat dalam pelatihan gender, yaitu (a) apa itu gender, (b) bagaimana gender dikonstruksikan, dan (c) bagaimana pembangunan menciptakan ideologi gender untuk melanggengkan konstruksi sosial tersebut. Materi pertama tentang pengertian gender tetap baku sampai sekarang, yaitu menunjukkan pengertian tentang seks dan tentang gender. Adapun materi tentang bagaimana gender dikonstruksikan berdasarkan pada pembagian kerja secara gender dalam keluarga, yakni ‘kerja perempuan’ yang diprasangkakan (stereotipe) dengan keperawatan rumah tangga dan ‘kerja laki’ sebagai pencari nafkah. Sementara materi tentang pembangunan dikaitkan dengan program pemerintah tentang keluarga berencana dan program pemberdayaan oleh LSM yang disarankan menggunakan analisis gender.

Analisis gender pada saat itu menggunakan model Caroline Moser (1993), terutama tentang tiga peran gender yang mencakup produktif, reproduktif dan sosial, dan perencanaan pemberdayaan perempuan berdasarkan kebutuhan gender praktis dan strategis. Selain itu juga, menggunakan kerangka analisis Harvard tentang akses dan kontrol perempuan di ranah produktif dan reproduktif yang agaknya masih populer hingga sekarang. Pernah pula menggunakan kerangka analisis yang diambil dari Sarah Longwe (1995) berkaitan dengan variabel negara dan proses pemberdayaan dari ‘bawah’ (*bottom up*).

Harus diakui bahwa berkat training gender yang dilakukan oleh Kalyanamitra kepada LSM umum dan aktivis perempuan di dalam LSM-LSM tersebut, dalam pertengahan dekade 1990-an telah melahirkan jaringan ‘kesetaraan gender’ baik di Jakarta maupun di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terminologi ‘kesetaraan gender’ menjadi populer sebagai tujuan dari semua program pemberdayaan perempuan. Melalui program training gender ini, saya berkesempatan ‘jalan-jalan’ dari kota ke kota dan bahkan lintas pulau untuk berkenalan dengan aktivis perempuan di kalangan LSM. Muncul Kelompok Sadar Gender Surakarta, Kelompok Kerja Jaringan Gender Timur, Kelompok Studi Gender Yogyakarta, Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh. Di Jakarta, saya dan rekan-rekan aktivis perempuan segenerasi saya, seperti Yuni Chuzaifah (komisioner

Komnas Perempuan), Yanti Muchtar almarhum (Kapal Perempuan), Titi Hartini, dan Nani Zulminarni (PEKKA) membentuk *Forum Setara*. Kegiatannya antara lain mendiskusikan dan menjembatani kesenjangan antara kegiatan peningkatan pendapatan perempuan miskin (*income generating*) yang dikesankan ‘developmentalis’ dibandingkan kegiatan kampanye dan advokasi hak perempuan yang tampak radikal.

Kesimpulan saya pada saat itu bahwa training gender—yang perspektifnya telah saya ubah tidak lagi dalam konteks pembangunan—efektif dalam membentuk agensi perempuan sebagai energi besar dalam membangun gerakan sosial melawan otoritarianisme Orde Baru. Posisi Kalyanamitra sangat strategis untuk membongkar kesadaran perempuan sebagai warga negara yang tidak memperoleh hak.

Suasana di Kalyanamitra itu membebaskan minat individu meskipun tidak tertutup adanya kontestasi. Saya melakukan observasi bangkitnya gerakan perempuan dalam melawan ideologi *Koncowingingking* Orde Baru seperti Kalyanamitra. Saya menemukan rujukan dari tulisan Julia Surjakusuma tentang ‘ibuisme negara Orde Baru’ untuk memberi kerangka tentang ideologi *Koncowingingking* Orde Baru. Hasilnya saya tulis di *Prisma* (1996) dengan judul “Politik Gender Orde Baru: Tinjauan Organisasi Perempuan Sejak 1980” dan tawaran membangun gerakan sosial yang tidak sekedar pada tuntutan demokratik kalangan terpelajar melainkan juga buruh, petani, miskin kota.

Saya mengenal terminologi gerakan sosial (*social movement*) setelah membaca Ron E. Roberts & Robert Marsh Kloss (1989) dan menurut saya, terkoneksi dengan gagasan tentang ilmu sosial transformatif. Gagasan ini saya masukkan ke dalam training gender untuk memberi perspektif gerakan perempuan. Langsung atau tidak langsung wacana gerakan sosial perempuan untuk mendepolitisasi (organisasi) perempuan Orde Baru menjadi kerangka kerja bagi gerakan saat itu. Dengan kata lain, agensi feminis ini mempunyai kesadaran dan tindakan politik untuk menuntut haknya sebagai warga negara dan masyarakat sipil yang mempunyai peradaban demokratis.

Perhatian Kalyanamitra untuk mengkaji gerakan sosial itu membuka perkawanan dengan aktivis laki-laki yang gigih mempraksiskan gagasan transformasi sosial seperti, Mansur Fakhri dan lainnya yang kemudian membangun INSIST. Agensi-ageni laki-laki ini mengajak saya untuk mengkaji gerakan LSM Perempuan dalam perspektif gerakan sosial yang benar-benar lahir dari

komunitas marginal itu sendiri. Cukup menarik bahwa analisis gender dikaitkan dengan kapitalisme-patriarkis dalam negara militeristik serta agenda gerakan sosial transformatif itu juga menjadi topik yang diminati oleh kelompok-kelompok diskusi gerakan mahasiswa. Akhirnya, pendidikan Kalyanamitra meluas tidak hanya untuk kalangan LSM melainkan masuk ke ranah kelompok diskusi gerakan mahasiswa dan juga gerakan jurnalis dalam wadah AJI.

Wajah Gerakan Sosial: Kalyanamitra dalam Gerakan Pro-Demokrasi dan Gerakan Korban Orde Baru

Sejak pembredelan Tempo, Editor, dan Detik pada 1994, eskalasi demonstrasi wartawan, aktivis LSM, mahasiswa, dan *public scholar* secara luas meninggi sampai 1996. Aktivis Kalyanamitra juga aktif turun ke jalan, termasuk menyebarkan *Mitra Media* dan membentuk Kelompok Perempuan Pro-Demokrasi (KPPD). Pada suatu saat, diumumkan pelarangan terbit atas sejumlah nama media alternatif antara lain *Mitra Media*. Saya terlupa institusi mana yang mengeluarkan pelarangan atas beberapa media alternatif tersebut, yang jelas sejak 1996, Kalyanamitra tidak lagi memproduksi *Mitra Media*.

Dalam kurun yang sama, meskipun tidak secara langsung, kami mendukung dari belakang demonstrasi buruh sangat besar dari PT Mayora Indah, PT GRI selama 1996. Selanjutnya, pada 27 Juli 1996 terjadi peristiwa pengambilalihan kantor PDI yang pada saat itu dikuasai pendukung Megawati. Peristiwa itu memang direncanakan, Kassospol ABRI Letjend Syarwan Hamid telah menyetujui rencana pengambilalihan kantor PDI. Pelaksanaan diserahkan ke Kodam Jaya yang rapatnya dipimpin oleh Kastaf Kodam Jaya, Brigjend Susilo Bambang Yudhoyono, dihadiri antara lain oleh Brigjend Zacky Anwar Makarim. Ternyata dalam penyerbuan kantor PDI itu banyak korban berasal dari warga kampung sekitarnya. Pada momentum itu, Sandyawan selaku Direktur Institut Sosial Jakarta (ISJ) mengajak banyak lembaga, termasuk Kalyanamitra untuk membentuk gerakan korban yang disebut Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRK). Peran Kalyanamitra adalah melakukan konseling kepada ibu rumah tangga di perkampungan sekitar kantor PDI yang mengalami trauma.

Ternyata persoalan berkembang dengan pemburuan dan penangkapan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang dinyatakan menunggangi mimbar bebas di kantor PDI. Pada 25 Juli 1997, di depan delegasi DPP

PDI pimpinan Soeryadi, Presiden Soeharto menyatakan bahwa mimbar bebas di kantor PDI tersebut telah disusupi 'setan gundul'. Penangkapan dan penahanan aktivis PRD pada saat itu menjadi perhatian TRK. Sebab apa? Para mahasiswa itu mempunyai ibu yang mengalami teror bahwa anak-anaknya telah makar dan dikait-kaitkan dengan PKI, tentu menimbulkan syok, malu, dan ketakutan. Di bawah pimpinan Ita F. Nadia, Kalyanamitra melakukan fungsi pendampingan kepada para ibu dan juga melayani kebutuhan aktivis PRD yang mendekam dalam penjara Salemba dan Cipinang.

Ini era kesibukan Kalyanamitra berubah ke arah pendampingan keluarga korban-korban Orde Baru dan berhadapan langsung dengan militer. Kami menjadi tahu wajah nyata intel dari BIA (Badan Intelijen ABRI) dan BIN (Badan Intelijen Negara). Sebelumnya, Kalyanamitra telah banyak melakukan pendampingan terhadap personal perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sehingga dalam situasi politik represif ini, sekurangnya memiliki pengalaman untuk mendampingi keluarga korban kekerasan militer.

Pada saat yang berbarengan, kondisi di Timor Leste dan Aceh membutuhkan perhatian. Operasi militer di kedua provinsi itu dilaporkan banyaknya pelanggaran berat HAM (*Gross Violation of Human Rights*), termasuk terhadap perempuan. Ita F. Nadia dan Nugroho Katjasungkana memusatkan perhatian ke Timor Leste, sedangkan perhatian saya untuk pendidikan bagi aktivis HAM di Aceh. Modul pelatihan gender berubah dari konteks pembangunan ke konteks hak asasi perempuan, pun sudah memasukkan unsur konseling untuk perempuan korban politik.

Suasana represif oleh militer pada masa itu terasa di mana-mana, sementara ibu rumah tangga mengeluhkan krisis ekonomi yang parah. *Suara Ibu Peduli* kemudian melakukan demonstrasi pada Februari 1998 yang dipimpin para feminis pemangku *Jurnal Perempuan*, seperti Gadis Arivia, Karlina Supelli, dan lainnya. Ide perlawanan simbolik melalui dua kategori "ibu" dan "susu bayi" ini merupakan suatu taktik melawan rezim yang tidak menuntaskan krisis dan malah melakukan represi semakin kuat. Myra Diarsi merupakan 'wakil' Kalyanamitra yang cukup aktif terlibat dalam gerakan ini.

Kalyanamitra juga mempunyai kesibukan sebagai bagian dari TRK berkaitan dengan kegiatan membangun *Koperasi Solidaritas* untuk membantu rumah tangga-rumah tangga miskin yang kesulitan memperoleh sembako. Posko koperasi dan gudang sembako di kantor

Kalyanamitra. Atas kerja sama relawan baik personal maupun organisasi, Koperasi Solidaritas untuk jangka beberapa bulan bisa meretas rantai pasok distribusi sembako yang dimonopoli pengusaha tertentu. Ibu-ibu di kampung Rawajati dan sekitarnya, dalam lingkungan kantor Kalyanamitra, setiap minggu mendapat kupon untuk antri memperoleh minyak goreng, beras, ikan asin, telur, dan lainnya. Bantuan dari dermawan juga cukup mengalir pada saat itu, termasuk untuk pengadaan sabun mandi dan sabun cuci. Terkadang bekerja sama dengan *Suara Ibu Peduli*, kami memperoleh susu bubuk untuk bayi yang dapat kami berikan kepada para ibu rumah tangga di kampung Rawajati.

Meskipun kesibukan Kalyanamitra terkesan reaktif terhadap situasi tidak terduga, tetapi reaksi-reaksi parsial ini sesungguhnya menciptakan pengalaman dan cara kerja dalam situasi darurat. Situasi politik semakin darurat pada 1998, ditandai dengan gerakan mahasiswa yang berhasil menduduki gedung MPR/DPR. Gerakan mahasiswa pada waktu itu membutuhkan logistik, seperti makan dan minum. *Koperasi Solidaritas* berubah menjadi sarana penyedia bahan pangan untuk dimasak di Kalyanamitra guna menyediakan nasi bungkus dan air minum kepada para mahasiswa. Luar biasa, bermunculan relawan, yaitu ibu-ibu, termasuk mantan aktivis Gerwani yang sudah tergolong lansia untuk menangani dapur umum. Dapur yang dikoordinasi Sita Aripurnami ini harus mengepul tiga kali sehari untuk mempersiapkan ratusan bungkus nasi. Sistem *shift* memasak dibuat, pun cukup banyak relawan laki-laki yang bersedia belanja ke pasar induk Kramat Jati. Biasanya aktivis perempuan yang tergolong muda mendapat peran membungkus nasi dan lauk lalu melipatnya dengan karet gelang.

Saat demonstrasi mahasiswa sangat meluas, para aktivis feminis, seperti Nursyahbani Katjasungkana, Tati Krisnawaty, dan lainnya mengumpulkan aktivis perempuan untuk membuat barisan perempuan di DPR. Saya termasuk yang terlibat dalam berbagai rapat aksi untuk mendukung pembentukan *Koalisi Perempuan Indonesia untuk Demokrasi dan Keadilan* (KPID). Seruannya pada masa itu menolak terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden pada pemilu ke-6 yang diselenggarakan Mei 1997. Pada masa itu, sistem pemilu untuk memilih anggota legislatif yang kemudian memilih presiden. Salah satu tuntutan KPID adalah pembentukan sistem multi-partai untuk menjamin proses demokratisasi.

Sebenarnya, untuk masuk ke lingkungan DPR/MPR yang telah diduduki mahasiswa tidak mudah, sebab

pasukan Brimob dan Angkatan Darat telah membarikade jalanan dan pintu masuk. Nasi bungkus plus obat-obatan diserahkan ke kontak-kontak mahasiswa di luar area gedung. Terkadang kami menggunakan ibu-ibu lansia atau ibu yang berdandan seperti anggota Dharma Wanita untuk menyelundupkan logistik dan obat-obatan ke dalam gedung parlemen. KPID mempunyai cara pula untuk menerobos barikade, tidak secara berbaris, melainkan 2-3 orang dengan gaya metropolitan seakan sedang menonton demo mahasiswa. Demo di parlemen bersama mahasiswa hampir setiap hari dilakukan KPID sampai Soeharto mengumunkan pengunduran diri pada 21 Mei 1998.

Reformasi di Atas Air Mata Perempuan

Kondisi darurat terus-menerus terjadi. Setelah penembakan mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998, saya sedang memberikan pelatihan bersama ELSAM di Puncak, Bogor, terperangah menyaksikan Jakarta penuh kobaran api dari berita televisi. Pada waktu itu tanggal 13 Mei dan kami bergegas kembali ke Jakarta pada 14 Mei. Semua tidak tahu apa yang telah terjadi. Kami tidak bisa ke mana-mana karena situasi tidak aman. Kami menginap di kantor Kalyanamitra. Namun sungguh aneh, kami tidak melihat militer sama sekali di Jakarta, padahal situasi begitu rusuh. Sementara, pada tanggal 12 Mei, militer ada di mana-mana hanya untuk menghadapi demonstrasi mahasiswa. Mengapa keberadaan pasukan militer seperti diserap alien: hilang dan tanpa ada pernyataan apa pun di televisi dari pejabat. Barulah pada 15 Mei pagi, televisi memberitakan Sjafrie Sjamsoeddin memimpin apel pagi tentara Kodam Jaya dengan nada seperti marah atau menegur bawahan. Saya tidak tahu apakah hal itu sandiwara, sebab selaku Pangdam Jaya seharusnya sejak 13 Mei sudah menyiagakan armada militernya. Saya merasa ada yang janggal dalam peristiwa ini. Bertanya ke sana ke mari juga tidak memperoleh jawaban pasti.

Kemudian, sekretariat pusat TRK di kantor ISJ memanggil SOS. Waktu itu, Ita F. Nadia yang hadir dalam rapat-rapat di TRK. TRK menurunkan tim investigasi dan bantuan darurat. Ternyata cukup banyak korban terbakar di dalam mal Jatinegara dan mal di Klender di Jakarta Timur. Cara mengumpulkan warga kampung dengan membakar ban sepeda motor di jalan, lalu warga berdatangan dan setelah menjadi massa, ada yang seolah-olah seperti mahasiswa mengajak mereka menjarah mal. Ketika massa sedang berada di dalam mal, pembakaran mal terjadi.

Mulanya Kalyanamitra mendapat peran untuk mendampingi trauma yang dialami ibu-ibu di kampung-kampung tersebut yang suami dan anak-anaknya terbakar. Kira-kira tanggal 18—19 Mei, tim investigasi TRK mendapatkan temuan yang sangat mengejutkan: bahwa telah terjadi kekerasan seksual secara massal di wilayah Jakarta bagian Utara yang populer disebut daerah Pecinan.

Adanya informasi tentang kekerasan seksual massal terhadap perempuan Tionghoa menggerakkan Kalyanamitra untuk membuka posko pengaduan di kantor dengan nama TRKP (Tim Relawan untuk Kemanusiaan Perempuan). Berbondong-bondong relawan yang terdiri dari para ibu Tionghoa yang menjadi korban kerusakan rumah dan penyerangan, datang ke posko Kalyanamitra. Sebagian dari mereka adalah aktivis gereja. Dari mereka pula, kami mendapat informasi tentang daerah-daerah terjadinya penyerangan oleh barisan massa yang tidak jelas dan melakukan kekerasan seksual. Informasi juga masuk melalui telepon. Saya mencatat semua informasi dalam sebuah buku besar dan kemudian melakukan verifikasi bersama para relawan yang tinggal di daerah Pecinan.

Secara umum terlihat polanya: di kampung-kampung Jakarta Timur yang padat miskin kota non-Tionghoa, warga diajak untuk menjarah dan kemudian dibakar di dalam mal. Di kampung-kampung dan ruko di Jakarta Barat-Utara yang padat warga Tionghoa, barisan massa melakukan penyerangan ke dalam rumah-rumah, sebagian rumah dibakar, dan melakukan kekerasan seksual. Saya menggunakan istilah kekerasan seksual massal sebab variasinya mencakup: penghinaan verbal, pelecehan seksual, kekerasan fisik, perkosaan dan perkosaan disertai pembunuhan di dalam rumah-rumah yang terbakar. Variasi kekerasan ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan Tionghoa itu sistematis dan masif.

Tekanan yang dialami oleh Kalyanamitra tentu sangat berat. Kami dalam kondisi ambigu: segera menyatakan jumlah korban demi tuntutan media massa dan militer, pun untuk kebutuhan advokasi gerakan perempuan atau kami berdiam diri dulu untuk melakukan verifikasi yang tentu sangat tidak mudah pada masa itu. Tidak pernah ada pilihan yang terbaik. TRKP segera membuka suara tentang jumlah korban, sementara saya sibuk melakukan verifikasi berdasarkan metode investigasi yang saya beri nama “Mengupas Bawang Bombay”.

“Mengupas Bawang Bombay”, nama itu saya pinjam dari seorang jurnalis perempuan yang pernah

menginvestigasi korban perempuan dalam perang di Bosnia. Dalam konteks ini, apa pun informasi dari berbagai sumber dalam kategori “mendengar” saya letakkan dalam ‘lingkaran 5’. Setelah itu, diverifikasi sampai ke “lingkaran 4”, yaitu sumber dalam kategori “melihat”, termasuk ikut menolong dan membawa ke dokter, rohaniwan, dan psikolog. Saya meletakkan dokter, rohaniwan, dan psikolog dalam “lingkaran 3”. Secara metodologis, pernyataan kategori “lingkaran 3” ini terverifikasi sebab mereka melihat, merasakan, dan menangani. Selanjutnya, kategori “lingkaran 2” adalah keluarga dan kategori “lingkaran 1” adalah korban itu sendiri. Argumen metodologis ini menurut saya, penting untuk melawan pengingkaran dari pejabat-pejabat militer, bahkan di dalam Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), argumen metodologis ini kami sampaikan. Di dalam konteks TGPF, saya dan Palupi merupakan tim asistensi dari TRKP untuk mempertanggungjawabkan data kepada koordinator tim asistensi yaitu Hermawan Sulistyio dari LIPI. Tugas tim asistensi adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber dan lalu memverifikasi ulang. Pada saat itu, ada dua anggota TGPF dari aktivis feminis, yaitu Nursyahbani Katjasungkana dan ibu Saporinah Sadli. Kami mengantar keduanya untuk menjumpai korban yang mengalami amnesia dan paranoid di sebuah rumah sakit di Jakarta.

Situasi itu membuat saya tidak turut berpesta-ria ketika Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Lidah ini masih terasa pahit dan lalu akan seperti apa reformasi itu?

Gerakan perempuan di Jakarta sangat sigap. KPID plus para akademisi feminis menghadap Habibie sebagai presiden pengganti Soeharto. Di bawah pimpinan ibu Saporinah Sadli, gerakan ini mendesak Habibie untuk mengakui adanya kekerasan seksual massal terhadap perempuan Tionghoa dan meminta maaf. Habibie cukup demokratis, ia menyerahkan penyusunan draf pidato yang akan ia bacakan melalui televisi pada saat itu juga kepada ibu Saporinah Sadli dan tim. Hanya saja, draf pidato itu kemudian diedit oleh sekretariat negara justru pada bagian yang fundamental yaitu “pengakuan dan permintaan maaf” sehingga pidato Habibie hanyalah bersifat ‘menyesalkan’ terjadinya peristiwa tersebut. Namun, setelah itu Habibie menyetujui pembentukan Komnas Perempuan dan menyerahkan prosesnya kepada ibu Saporinah Sadli.

Setelah itu, pekerjaan kedaruratan belum selesai. Kalyanamitra masih memusatkan perhatian terhadap kekerasan rezim Orde Baru meluas di Timor Leste,

Aceh, dan Maluku. Itu sebabnya, Kalyanamitra tidak turut serta menjadi panitia Kongres Perempuan setelah reformasi pada Desember 1998 di Yogyakarta. Selanjutnya, gerakan perempuan setelah reformasi terkonsentrasi pada dua persoalan: (a) hak asasi perempuan, Kalyanamitra memusatkan perhatiannya secara penuh dan (b) *affirmative action* untuk kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam institusi politik formal dimana Koalisi Perempuan Indonesia memimpin.

Setelah reformasi, peran Kalyanamitra tetap dalam koridor membangun sistem kerja pemulihan korban kekerasan politik negara tanpa menafikan yang bersifat personal. Secara pribadi, saya baru memiliki kesempatan untuk menulis "The Women's Movement in Reformasi Indonesia" dalam *Indonesia the Uncertain Transition* (2001) atas undangan Arief Budiman sebagai editor. Namun, saya mengalami keraguan terhadap daya ilmu sosial transformatif atau emansipatoris yang ternyata tidak berdaya di hadapan kekuasaan. Kalyanamitra sebagai organisasi yang saya idamkan akan membangun gerakan sosial di basis perempuan marginal, dalam praktiknya terbelenggu dalam kedaruratan terus-menerus. Tidak keliru. Saya menganggapnya sebagai salib yang diemban Kalyanamitra dalam mengakhiri rezim Orde Baru

Penutup

Narasi dari ketiga individu ini, yang dalam periode Soeharto merupakan pengurus organisasi feminis Kalyanamitra, memberigambaran mengenai keterkaitan antara *political agency* individu dan struktur kekuasaan yang membentuk serta membatasinya. Aktivitas pengorganisasian diskusi kelompok yang menyoroti isu kelas dan gender (dalam kasus keterlibatan dengan kelompok buruh), serta isu gender dan budaya (dalam kasus gender training di berbagai daerah), serta isu gender dan gerakan sosial (dalam pembentukan jaringan pro-demokrasi) merupakan bentuk-bentuk praksis kontra-hegemonik yang amat esensial. Namun pada saat itu, kegiatan ini secara sosial dan politik dianggap berbahaya, bahkan dianggap sebagai ancaman terhadap kestabilan kekuasaan maupun ideologi politik negara. Justru di titik inilah strategi masing-masing individu dan subjektivitas mereka—sebagaimana tergambar dalam perkembangan pandangan politik yang dibentuk oleh pengalaman konkret dalam menghadapi situasi represif—menjadi penting untuk direfleksikan ke depan. Refleksi ini tidak

hanya relevan bagi strategi gerakan sosial secara kolektif, tetapi juga bagi posisi dan peran individu di dalamnya sebagai subjek politik yang berpengetahuan (*embodied knowledge*), yang akan tetap menjadi faktor penting dalam menghadapi dinamika politik otoritarianisme masa kini maupun di masa yang akan datang, ketika tanda-tanda kemunduran demokrasi menunjukkan kemiripan dengan periode anti-demokrasi rezim Soeharto.

Sebagai konsekuensinya, pengalaman yang direkam dalam narasi ini mengajak kita untuk meninjau kembali strategi gerakan perempuan masa lalu bukan semata sebagai catatan sejarah, tetapi sebagai sumber pengetahuan politis yang hidup dan terus bekerja. Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah bagaimana pelajaran historis ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat strategi gerakan perempuan hari ini, dan sejauh mana bentuk-bentuk *counter-hegemonic praxis* yang pernah efektif melawan otoritarianisme dapat dimaknai ulang dan diadaptasi untuk menghadapi kemunculan kembali kekuasaan yang represif di masa kini.

Daftar Pustaka

- Budiman, A. 1981. *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis*. Gramedia.
- Collins, P. H. 1990. *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*. Boston: Unwin Hyman.
- Gramsci, A. 1935. *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.
- hooks, b. 1994. *Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom*. New York and London: Routledge.
- Lamphere, L. et al. 1993. *Sunbelt Working Mothers: Reconciling Family and Factory*. Cornell University Press: Ithaca, NY.
- Longwe, S. H. 1995. Gender Awareness: The Missing Element in the Third World Development Program dalam buku C. March & T. Wallace (eds.), *Changing Perception: New Writings on Gender and Development*. Oxfam: Oxford.
- Mahdami, F. 2017. Fauzi Abdullah (1949-2009): Obor yang Tak Pernah Padam. *Majalah Sedane*. 25 Mei, 2017.
- Moser, C. 1993. *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*. New York and London, Routledge.
- Rahayu, R. I. 1996. "Politik Gender Orde Baru: Tinjauan Organisasi Perempuan Sejak 1980". *Prisma*.
- Rahayu, R. I. 2001. "The Women's Movement in Reformasi Indonesia". dalam Kingsbury, Damian and Arief Budiman, A. *Indonesia: The Uncertain Transition*. Adelaide: Crawford House Publishing.

Roberts, R. E. & Kloss, R. M. 1979. *Social Movements: Between the Balcony and the Barricade*. St. Louis, Missouri: Mosby.

Rudiono, D. 1992. Kebijakan Perburuhan Pasca Boom Minyak. *Prisma* No. 1 Tahun XXI Januari 1992. LP3ES.

Suryakusuma, J. 2011. *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Komunitas Bambu: Jakarta.

United Nations. 1979. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*. United Nations: New York.

Catatan Kaki

- 1 Narasi Myra Diarsi dan Ruth Indiah Rahayu merupakan catatan pribadi masing-masing, yang merupakan hasil diskusi reflektif yang dilakukan bersama Ratna Saptari. Narasi Ratna Saptari merupakan catatan pribadi, yang juga merupakan hasil refleksi atas cerita yang diberikan Myra dan Ruth.
- 2 Ia meninggal tahun 2009 dan riwayatnya bisa dilihat di Majalah Sedane, 25 Mei 2017.
- 3 Catatan 5 Desember 1983.
- 4 Catatan 4 September 1983.
- 5 Catatan 17 Juni 1984.

